PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK: KAJIAN FAKTOR PENYEBAB DAN ALTERNATIF PENCEGAHANNYA

Abu Hanifah

ABSTRAK

Pengkajian ini bertujuan mengetahui : (1) faktor penyebab meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak di Indonesia; (2) Peran Pemerintah dan LSM dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Cara mencapai tujuan dilakukan studi dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dikategorisasi, dianalisis, dan diinterpretasi secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak yaitu: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap ajaran agama, dan sebagian besar orangtua terlibat dalam praktik perdagangan perempuan dan anak. Peran pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak, baru terbatas pada tingkat sosialisasi dan penyusunan infrastruktur kelembagaan yang terkait dengan trafficking, namun beberapa LSM telah merespons persoalan trafficking dengan berbagai aksi, baik dalam bentuk penanganan kasus maupun pencegahan terjadinya trafficking. Solusi yang diajukan dalam pengkajian ini, adalah pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui pemberdayaan sosial keluarga, dimana keluarga yang ketahanan sosialnya lemah ditingkatkan agar dapat melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Upaya peningkatan peran dan fungsi keluarga, dilakukan dengan intervensi pekerjaan sosial. Pekerja sosial sebagai pelaku perubahan diharapkan dapat memperbaiki kondisi keluarga, menyangkut beberapa aspek, yaitu : (a) pelaksanaan peran sesuai dengan kedudukan; (b) pemenuhan kebutuhan dasar; (c) terjalinnya hubungan akrab antara keluarga dengan lingkungannya; dan (d) terwujudnya keluarga yang harmonis.

Kata kunci : Perdagangan Perempuan dan Anak, Alternatif Pencegahannya.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*trafficking*) sebagai salah satu perlakuan terburuk dalam pelanggaran hak dan martabat manusia, bukan merupakan hal baru. Praktik jual beli manusia terutama perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan manusia sungguh memprihatinkan, yaitu selain jumlah korban yang semakin besar, juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi, dan modus operandinya semakin canggih.

Suryadi Suparman selaku Deputi Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa secara empiris sebagian besar korban perdagangan perempuan manusia adalah perempuan. Laki-laki yang menjadi korban pada umumnya adalah remaja laki-laki. Mereka dipekerjakan di jermal¹ atau korban paedofilia²

Dalam budaya masyarakat yang patriarki, masih terdapat diskriminasi gender. Perempuan dan anak perempuan seolah hanya jadi pelengkap seksualitas dan dianggap rendah. Budaya yang sudah mengakar Sejak dulu itu sulit sekali diubah. Kondisi ini diperparah oleh

¹ Jermal : Alat penangkap ikan berupa pagar dari pancang yang dipasang di tepi laut, diberi pintu seperti bubu dan dibelakangnya dipasang jaring besar yang dapat diangkat-angkat

² Paedofilia : orang dewasa terutama laki-laki mempunyai selera seksual terhadap anak kecil

kemiskinan, pengangguran, kawin usia dini, serta budaya masyarakat yang hanya mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja. Dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan sosial itu mudah sekali diiming-iming dan dibujuk oleh para calo. Mereka dijanjikan bekerja di kota atau diluar negeri dengan janji upah yang tinggi. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah penipuan (Kompas, 18-4-2008). Selanjutnya Suryadi mengatakan baru-baru ini ada oknum guru yang menawari murid-muridnya untuk bekerja dan dijanjikan akan dibayar dengan dollar AS. Modus melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) dijanjikan oknum guru SMKN jurusan nautika perikanan laut Sulawesi Selatan yang merekrut siswa dengan biaya Rp.5 juta – Rp.6,5 juta untuk dipekerjakan di kapal nelayan, dan ternyata mereka dipekerjakan di lain bidang yang dijanjikan (Kompas, 15-5-2008).

Elizabeth Dunlap selaku manager Program Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia, mengatakan korban perdagangan manusia periode maret 2005 hingga Januari 2008 mencapai 3.042 orang yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia dan dipekerjakan di beberapa negara, terutama Malaysia (Kompas, 18-4-2008). Data tersebut adalah fenomena gunung es, dan jumlah korban perdagangan manusia sesungguhnya tidak diketahui dengan pasti. *Hal itu di sebabkan karena perdagangan manusia termasuk kasus kriminal, ilegal, tersembunyi, terorganisasi dengan rapi sehingga sangat sulit mendapatkan data yang benar-benar valid, ujar Deputy Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Surjadi Soeparman.*

Perhatian pemerintah untuk memberantas perdagangan manusia cukup besar, terbukti dengan dikeluarkannya "Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak" (RAN-P3A) melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002. Kemudian ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang isinya antara lain menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Akhir-akhir ini telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sebagai

perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan protokol PBB tentang mencegah, memberantas dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia (lihat Nuh, 2005; dan penjelasan UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Beberapa hasil penelitian (lebih jelas lihat gambaran umum) menunjukkan bahwa sudah ada kerja sama antara pemerintah daerah dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, Namun tampaknya kerja sama tersebut belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah *trafficking*. Faktor utama terjadinya perdagangan manusia, adalah karena kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, dan ketidak taatan terhadap ajaran agama (Suryadi, Kompas 18-4-2008, lihat Firdous, 004:12). Dan faktor lain yang dipandang perlu diperhatikan adalah keterlibatan orangtua dalam kasus perdagangan perempuan dan anak.

Memperhatikan hasil-hasil penelitian menunjukkan adanya keterlibatan orangtua dalam perdagangan perempuan dan anak, dan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, dimana dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 57 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian berarti orangtua atau keluarga berkewajiban mencegah terjadinya perdagangan manusia.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian pada latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dalam kajian ini, ialah : " Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak"? Berpedoman pada pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Indonesia?

2. Bagaimana peran pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak?

C. Tujuan Pengkajian

Pengkajian ini bertujuan: (1) diketahuinya faktor penyebab meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak di Indonesia; dan (2) diketahuinya peran pemerintah dan LSM dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Hasil pengkajian diharapkan dapat memberi masukan sebagai sumbang saran, terutama terhadap unit terkait di lingkungan Departemen Sosial maupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai wewenang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia terutama perempuan dan anak.

D. Metode Pengkajian

Jenis kajian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan bahan memanfaatkan data sekunder, yaitu : (1) referensi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak; (2) artikel mengenai tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang dimuat di media massa, khususnya koran Kompas edisi tahun 2008; dan (3) beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah *trafficking* yang dilaksanakan oleh pusat studi kependudukan dan kebijakan universitas Gajah Mada Yogyakarta kerjasama dengan Ford Foundation periode tahun 2004-2005. Sebagai dasar pertimbangan digunakan beberapa artikel dan hasil-hasil penelitian tersebut, karena dapat diperoleh informasi mengenai faktor penyebab dan sejauhmana upaya pemerintah dan LSM untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang/manusia. Data dan informasi yang telah terkumpul, kemudian dikategorisasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara deskriptif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perdagangan Orang/Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada ketentuan umum disebut bahwa: *Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril. Sedangkan eksploitasi seksual adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.*

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disebutkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dan hal itu telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dengan penjelasan tersebut berarti perdagangan perempuan dan anak termasuk dalam definisi perdagangan orang.

Mencermati pengertian perdagangan orang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, setidaknya harus mencakup 3 (tiga) unsur pokok sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia yaitu : proses, cara, dan tujuan. Untuk lebih jelasnya dapat disimak tabel dibawah ini :

Kelima jenis perdagangan anak yang dikemukakan oleh Irwanto diatas, tidak termasuk kasus adopsi dan konsumsi pengidap paedofilia. Sedangkan kedua kasus tersebut termasuk jenis atau bentuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang perlu mendapat perhatian. Terlepas dari kedua hal

Tabel 1
Alternatif Proses, Cara dan Tujuan Perdagangan Manusia

Proses	Cara	Tujuan
1. Perekrutan	1. Ancaman	1. Prostitusi
2. Pengiriman	2. Pemaksaan	2. Pornografi
3. Pemandangan	3. Penculikan	3. Kekerasan/Eksploitasi
4. Penampungan	4. Penipuan	4. Kerja Paksa
5. Penerimaan	5. Kecurangan	5. Perbudakan/Praktek Serupa
	6. Kebohongan	
	7. Penyalahgunaan kekuasaan	

Ketiga unsur pokok tersebut di atas bersifat saling terkait, apabila salah satu faktor dari ketiga kategori tersebut terpenuhi, maka terjadilah perdagangan manusia. Artinya, persetujuan dari korban tidak lagi relevan apabila salah satu cara yang tercantum diatas digunakan. Untuk kasus perdagangan anak, tidak berlaku syarat persetujuan, sebab banyak kasus perdagangan yang menimpa anak masuk dalam kategori pemaksaan dengan tanpa persetujuan (lihat Nuhm 2005:26).

Irwanto, dkk (dalam Sofian, dkk, 2004:12) mencatat sedikitnya terdapat lima jenis perdagangan anak yang dijumpai di Indonesia, yaitu : (1) perdagangan anak untuk tujuan pelacuran; (2) perdagangan anak untuk dijadikan pembantu rumah tangga; (3) perdagangan anak untuk dijadikan pengemis; (4) perdagangan anak untuk dipekerjakan pada tempat tempat berbahaya jermal ; dan (5). Perdagangan anak untuk jadikan pengedar narkoba . selanjutnya Sofian mengatakan bahwa kantor Menteri negara Pemberdayaan perempuan, mengidentifikasi sedikitnya sebelas bentuk perdagangan anak dan perempuan, yaitu : (1) pekerja seksual komersial; (2) buruh migran; (3) buruh murah; (4) pekerja domestik (PRT); (5) Pengemis; (6) pengedar narkoba; (7) pekerja di tempat hiburan; (8) konsumsi pengidap paedofilia; (9) pengantin pesanan; (10) adopsi; dan (11) pemindahan organ tubuh.

tersebut, dan sesuai dengan judul dari tulisan ini "Perdagangan perempuan dan Anak", maka bentuk perdagangan anak dan perempuan mengacu pada hasil identifikasi dari kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang/manusia pada dasarnya telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 297. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia yang tegas secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan manusia yang mampu menyediakan landasan hukum material dan formal. Dengan dasar itu ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ini merupakan wujud dari kepedulian/perhatian pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak.

Untuk mencegah meningkatnya tindak pidana perdagangan orang tidak hanya cukup dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi perlu diketahui faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang tersebut. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan perdagangan orang yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kerja sama dengan Ford Foundation pada tahun 2004 dan 2005, dapat dikemukakan bahwa faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah kemiskinan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan keluarga, karena tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, sosial kontrol keluarga dalam arti pengawasan keluarga terhadap anak, juga menjadi rendah disebabkan kesibukannya orangtua mencari nafkah di luar rumah. Untuk keluar dari kondisi yang memprihatinkan ini tidak jarang orangtua tanpa sadar melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama, seperti adanya keterlibatan orangtua dalam tindak pidana perdagangan perempuan dan anak mereka sendiri. Berdasar pada kenyataan ini, maka solusi yang ditawarkan adalah "Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak Melalui Pemberdayaan Sosial Keluarga".

B. Pengertian Pemberdayaan Keluarga

Goode (2007:90) menyebutkan keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka. Istilah keluarga inti dalam ilmu Antropologi biasa disebut dengan keluarga batih, Somah, umpi dan sebagainya. Keluarga batih atau keluarga inti ini di negara-negara barat disebut dengan istilah *nuclear family*. Beberapa keluarga batih, biasanya terdiri dari tiga atau empat kelompok hidup bersama dan terikat dalam keluarga besar disebut dengan istilah *extended family*.

Dalam makalah yang berjudul "Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Peran Keluarga" yang disampaikan oleh Drs. Hadi Carito selaku Direktur Pemberdayaan Peran Keluarga Dalam Rapat koordinasi pada tanggal 10 Juni 2004

di Cawang Jakarta, terdapat beberapa pointer mengenai pengertian yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga. Pada pointer (3) disebutkan pengertian pemberdayaan adalah proses penguatan kemampuan (fisik, mental, sosial, dan ekonomi) yang ada pada perseorangan, keluarga, kelompok, atau komunitas yang tujuannya adalah mewujudkan kemandirian. Kemandirian ini dikembangkan melalui kesadaran, kemampuan, pelibatan (partisipasi) pendampingan, pemihakan, pembelaan dan pembentukan jaringan kerja. Pada Pointer (4) peran dapat diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang harus ditampilkan sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya pada pointer (5) pemberdayaan keluarga adalah upaya meningkatkan pemahaman kesadaran dan kemampuan keluarga dalam mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial dan ekonomi yang dimiliki, sehingga mampu mandiri dalam melaksanakan fungsi dan peran keluarga secara optimal, serta menjalin hubungan yang harmonis antar sesama anggota keluarga dan dengan lingkungannya. Kemudian pada pointer (6) pemberdayaan peran keluarga adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan motivasi keluarga dalam mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang dimiliki keluarga, sehingga diharapkan keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peran keluarga secara optimal serta menjalin hubungan yang harmonis antara keluarga dan lingkungannya. Pada pointer (7) fungsi-fungsi keluarga adalah antara lain: reproduksi; keagamaan; pendidikan; sosial; budaya; kasih sayang; reaktif; perlindungan; ekonomi; sosialisasi; pembinaan lingkungan; kontrol sosial; tanggungjawab sosial dalam turut menata dan memelihara lingkungan kehidupan yang kondusif.

Pemberdayaan sosial keluarga, yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mendayagunakan potensi keluarga dan lingkungannya guna meningkatkan keberfungsian keluarga serta tanggungjawab sosial keluarga, sehingga terjalin interaksi sosial saling menguntungkan antara keluarga dan komunitas lingkungannya untuk memperkuat ketahanan sosial keluarga (lihat kebijakan dan strategi pemberdayaan peran keluarga 2004:13). Dalam pola pemberdayaan kesejahteraan sosial (2003:22)

pemberdayaan sosial peran keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial keluarga di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan pemberdayaan sosial keluarga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat.

III. GAMBARAN UMUM

Pada latar belakang masalah telah disinggung mengenai jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia periode Maret 2005 hingga Januari 2008 mencapai 3.042 orang. Dari jumlah tersebut dapat dirinci menurut jenis korban, daerah asal, dan daerah tujuan mereka dikirim atau dipekerjakan. Hal itu dapat kita simak melalui beberapa tabel berikut:

Tabel 2

Jumlah Korban Perdagangan Manusia dirinci Menurut Jenisnya
Periode Maret 2005 - Januari 2008

No	Jenis Korban	Jumlah	
		F	%
1	Bayi Perempuan	5	0,16
2	Anak Perempuan	651	21,40
3	Anak Laki-laki	134	4,41
4	Perempuan	2.048	67,33
5	Dewasa Pria Dewasa	204	6,71
	Jumlah	3.042	100,00

Sebagian besar korban tindak pidana perdagangan manusia adalah perempuan dewasa sebanyak 67,33 persen dan anak perempuan 21,40 persen. Sedangkan laki-laki dewasa dan anak laki-laki hanya 6,70 persen dan 4,41 persen. Mereka berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Jumlah Korban Perdagangan Manusia Menurut Daerah asal
Periode Maret 2005- Januari 2008

No	Provinsi	Jumlah	
		F	%
1	Kalimantan Barat	707	23,24
2	Jawa Barat	629	20,68
3	Jawa Timur	370	12,16
4	Jawa Tengah	319	10,49
5	Nusa Tenggara Barat	212	6,97
6	Sumatera Utara	207	6,81
7	Lampung	150	4,93
8	Nusa Tenggara Timur	118	3,88
9	Sumatera Selatan	65	2,14
10	Banten	64	2,10
11	Sulawesi Selatan	46	1,51
12	DKI Jakarta	42	1,38
13	Lain-lain	113	3,71
	Jumlah	3.042	100,00

Sumber : Kompas 18 April 2008

Korban tindak Pidana perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak berasal dari 12 provinsi. Jumlah korban yang terbanyak berasal dari Provinsi Kalimantan Barat dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 23,24 persen dan 20,68 persen. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing 12,16 persen dan 10,49 persen. Sedangkan provinsi lainnya masing-masing dibawah 7 persen, dan Provinsi DKI Jakarta hanya 1,38 persen. Para Korban dikirim ke berbagai negara, dan untuk mengetahuinya secara jelas dapat disimak tabel berikut :

Tabel 4

Jumlah Korban Perdagangan Manusia dikirim ke beberapa negara
Periode Maret 2005 Januari 2008

No	Provinsi	Jumlah	
		F	%
1	Malaysia	2.305	78,77
2	Indonesia	587	19,30
3	Arab Saudi	49	1,61
4	Singapura	28	0,92
5	Jepang	27	0,89
6	Suriah	11	0,36
7	Kuwait	10	0,33
8	Taiwan	6	0,20
9	Irak	4	0,13
10	Lain-Lain	10	0,49
	Jumlah	3.042	100,00

Sumber : Kompas 18 April 2008

Sebagian besar atau 75,77 persen korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dikirim ke Malaysia. Sebanyak 19,30 persen dikirim ke berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan ke negara-negara lain, yaitu : Arab Saudi; Singapura; Jepang; Suriah; Kuwait; Taiwan dan Irak persentasenya relatif kecil rata-rata dibawah satu persen.

Menyimak kasus-kasus tindak pidana perdagangan manusia periode tahun 2004-2008 (Kompas, 18/4/2008) dapat dikemukakan sebagai berikut : Pada tanggal 11 Juni tahun 2004, terungkap kasus penjualan bayi-bayi dari Indonesia ke Singapura. Untuk mendapat bayi-bayi dari Indonesia, para peminat harus membayar 30-35 juta rupiah. Pembayaran dilakukan setelah terbit surat adopsi yang sah. Pada tanggal 26 Desember tahun 2005, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tangerang menghukum pelaku perdagangan anak berkedok adopsi. Dan Pada tanggal 27 Juni 2007, Kepolisian Kota Surabaya meringkus otak komplotan perdagangan bayi.

Beberapa kasus tindak pidana perdagangan perempuan karena tertipu dan akhirnya dijerumuskan ke dunia pelacuran di Malaysia, antara lain: pada tanggal 25 Juni tahun 2004, dua dari tiga perempuan yang berasal dari Kalimantan Barat di Pulangkan dari Malaysia, mengaku menjadi korban perdagangan manusia. Mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Malaysia, ternyata dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial di Kuala Lumpur. Pada tanggal 7 November 2005, pihak Polda Metro Jaya berhasil menangkap oknum perdagangan wanita untuk menjadi pekerja seks komersial di Serawak. Pada bulan Mei dan Agustus tahun 2007, Polri ungkap sindikat perdagangan perempuan untuk menjadi PSK di Malaysia.

Kasus-kasus perdagangan perempuan yang berasal dari beberapa provinsi dan dikirim ke provinsi lain dalam wilayah Indonesia, yaitu pada bulan September dan Desember 2006, terbongkar perdagangan perempuan berkedok tenaga kerja dari Jawa Barat ke dunia prostitusi di lokasi Sambung Giri di Bangka. Pada tanggal 23 Januari 2007, sebanyak 327 TKW berusia di bawah 18 tahun berasal dari Nusa Tenggara Timur dijadikan PSK di Papua. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2008, terungkap sebanyak 16 perempuan menjadi

pemijat dan pekerja seks di Panti Pijat di Kelapa Gading Jakarta Utara.

Sementara itu dari Kalimantan Barat seringkali bermigrasi ke Taiwan dan Hongkong dalam bentuk kawin kontrak. Tak jarang mereka dijerumuskan ke lembah prostitusi dan kerja ijon (Kompas, 18/4/2008).

Di kalangan akademisi telah menunjukkan perhatiannya terhadap kasus perdagangan manusia dengan cara melakukan penelitian di beberapa provinsi. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bekerja sama dengan Ford Foundation, telah melakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan perdagangan manusia antara lain: Jejaring Anti Trafficking oleh Mohamad Nuh; Utang Selilit Pinggang (sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan) yang dilaksanakan oleh Johanna Debora Imelda, dkk; Respons LSM terhadap Perdagangan Anak Perempuan oleh Firdous; menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak oleh Ahmad Sofian, dkk; Paedofilia di Bali dilakukan oleh Rohman dkk.)

Penelitian tentang "Jejaring Anti Trafficking" yang dilaksanakan oleh Mohamad Nuh pada tahun 2005 di Kota Bandung – Provinsi Jawa Barat, menunjukkan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, Namun kerjasama tersebut tampaknya belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah korban trafficking. Kemudian penelitian yang berjudul " Utang selilit pinggang" dalam kaitannya dengan sistem ijon dalam perdagangan perempuan yang dilakukan oleh Johanna Debora Imelda pada tahun 2004 di Jakarta Utara, menunjukkan bahwa terdapat tiga aktor utama yang berperan mengembangkan dan mempertahankan sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan, yaitu orangtua dan kerabat para gadis, para bos di Jakarta dan para calo di kampung serta pejabat lokal (kampung).

Penelitian yang dilakukan oleh Firdous pada tahun 2004 di Surabaya, dengan judul "Respons LSM terhadap perdagangan anak perempuan", menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan anak perempuan di Surabaya belum berjalan secara efektif.

Modus operandi perdagangan anak perempuan dilakukan dengan cara penipuan bermotif mencari pekerjaan yang akhirnya menjerumuskan mereka ke lokasi pelacuran. Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Ahmad Sofian di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 yang berjudul: "Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak", menunjukkan bahwa fenomena perdagangan anak untuk pelacuran masih dianggap sebagai hal baru, dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah masih bersifat umum, yaitu dikaitkan dengan kebijakan tentang pelacuran atau program untuk wanita tuna susila. Institusi yang sudah mengambil tindakan konkret pada masalah perdagangan anak terbatas di kalangan LSM dan Kepolisian Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian tentang "Paedofilia di Bali" yang dilaksanakan oleh Rohman dan Andrea Rosy Starinne pada tahun 2005 di Bali, menyatakan bahwa selama kurun waktu 1996-2004 terdapat paedofil yang berasal dari Amerika, Australia, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda yang beroperasi di Bali. Dalam menjalankan operasi mereka, anak yang diperdagangkan biasanya ditujukan untuk konsumsi sesama paedofil atau untuk dipekerjakan di pelacuran, bar dan restoran. Untuk merekrut korban, paedofil menggunakan sejumlah motif antara lain berperan sebagai Bapak Angkat, berpacaran, perkawinan dan bantuan ekonomi.

Analisis dalam pengkajian ini difokuskan pada (1) faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak; dan (2) pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak oleh Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian diajukan suatu solusi pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui pemberdayaan sosial keluarga.

IV. FAKTOR PENYEBAB

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pendahuluan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak, adalah karena: kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini; dan ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Faktor-faktor penyebab tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya kasus tindak

pidana perdagangan perempuan dan anak. Untuk mencegah meluas dan meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak, maka akar permasalahannya perlu dihilangkan dan alternatif untuk menghilangkannya melalui pemberdayaan sosial keluarga. Keempat faktor penyebab tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

A. Kemiskinan

Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial, antara lain semakin banyak jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan menjadi pangkal bagi munculnya disharmoni keluarga, termasuk di dalamnya muncul praktik perdagangan anak perempuan untuk tujuan pelacuran (Firdous, 2004:12). Kemiskinan dianggap sebagai faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Penduduk miskin tidak hanya memiliki keterbatasan pilihan-pilihan untuk mencari sumber penghidupan, tetapi mereka juga hanya memiliki sebagian kekuasaan sosial untuk mengontrol kondisi lingkungan yang menekan dirinya. Keinginan untuk memperbaiki kondisi yang demikian seringkali membuat banyak perempuan memilih untuk melakukan migrasi. Karena ketidaktahuan informasi tentang daerah tujuan dan keinginan untuk memperbaiki nasib, mereka justru menghadapi risiko untuk diperdagangkan.

Penelitian yang berjudul "utang selilit pinggang-Sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan" yang dilakukan oleh Johanna Debora Imelda dkk pada tahun 2004 di Jakarta Utara, dapat dikemukakan bahwa responden sebanyak 50 orang anak perempuan yang berumur 13 s.d. 18 tahun sebagian besar atau 76 persen berasal dari Indramayu. Pekerjaan orangtua mereka sebagian besar adalah buruh tani (53,7%) dengan jumlah tanggungan rata-rata 4-6 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mereka berasal dari keluarga miskin.

Untuk menghilangkan faktor penyebab sebagai akar permasalahan yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, maka terhadap keluarga yang demikian perlu ditingkatkan kondisi ekonomi mereka dengan memberi bantuan

serta bimbingan peningkatan usaha ekonomi produktif.

B. Pendidikan rendah

Tingkat pendidikan yang rendah, juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia. Ini dapat dipahami mengingat dalam komunitas yang mengedepankan nilai-nilai patriarki, anak perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua, dan anak laki-laki yang diutamakan untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi (lihat Firdous, 2004:13). Dengan pendidikan yang rendah mudah sekali ditipu oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan yang "baik" dengan gaji yang besar, namun sesungguhnya suatu trik tipuan untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran. Contoh kasus tindak pidana perdagangan perempuan karena tertipu, dan akhirnya dijerumuskan ke dunia pelacuran di Malaysia antara lain : pada tanggal 25 Juni tahun 2004, dua dari tiga perempuan yang berasal dari Kalimantan barat di pulangkan dari Malaysia, mengaku menjadi korban perdagangan manusia. Mereka menjanjikan akan dipekerjakan sebagai buruh pabrik di Malaysia, ternyata dijerumuskan menjadi pekerja seks komersial di Kuala Lumpur.

Untuk mengatasi hal tersebut, melalui pemberdayaan sosial keluarga perlu diberi wewenang terhadap keluarga yang menjadi sasaran pemberdayaan mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga dan tidak membedakan jenis kelamin dalam mengikuti pendidikan. Disamping itu, perlu juga diberi berbagai wawasan mengenai trik-trik penipuan yang sering digunakan oleh para calon tenaga kerja di dunia pelacuran.

C. Kawin Usia Dini

Batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Mulia, 2007 :140). Selanjutnya Mulia mengutip hasil penelitian yang dilaksanakan oleh UIN Jakarta (2000) mengungkapkan temuan rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar 19,9 tahun dan laki-laki 23,4 tahun. Kematangan usia tersebut idealnya berupa akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan

kejiwaan agama dan budaya. Perkawinan pada usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggungjawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Johanna Debora Imelda dkk di Jakarta Utara, menunjukkan bahwa responden sebanyak 50 orang yang berusia 13 s.d. 18 tahun ternyata 12 persen berstatus kawin, sebesar 22 persen berstatus janda dan sebanyak 66 persen belum menikah. Ini berarti sebanyak 34 persen sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan telah melakukan kawin usia dini.

Untuk mengatasi hal tersebut, melalui pemberdayaan sosial keluarga perlu disosialisasikan Undang-Undang Perkawinan agar mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi apabila mereka melaksanakan pernikahan usia dini.

D. Ketidaktaatan Menurut Ajaran Agama

Faktor yang juga penting untuk menjelaskan persoalan *trafficking* secara umum adalah adanya keterlibatan orangtua sebagai salah satu unsur pelaku *trafficking* tersebut. Beberapa studi tentang perdagangan anak melaporkan bahwa cukup banyak kasus perdagangan anak melibatkan orangtua. Hasil studi Firdous tentang "Respons LSM terhadap Perdagangan Anak di Surabaya", menegaskan bahwa fenomena kasus dua orangtua menjadi germo bagi anaknya sendiri (lihat Firdous, 2004:18-19). Kasus *trafficking* di kota Bandung dan Jawa Barat secara umum yang melibatkan orangtua sebagai pelaku lebih banyak disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu (Irwanto,kk,2001 dalam Nuh, 2005:83). Kemudian penelitian yang dilakukan ILO di Jakarta dan Jawa Timur tentang perdagangan anak untuk eksploitasi seksual menunjukkan jaringan perdagangan tersebut melibatkan berbagai pihak (lihat Imelda, 2004:26). Pertama, dari orang-orang terdekat korban, seperti orangtua yang mempersiapkan anak-anaknya, baik secara sosial, psikologis,

maupun spiritual, saudara atau tetangga yang biasanya berperan sebagai mata-mata untuk menyeleksi anak-anak yang dapat direkrut. Kedua, calo yang berperan sebagai mediator dalam bisnis seksual. Ketiga, tokoh formal maupun informal yang memperlancar sistem kerja bisnis seksual tersebut. Keempat, adalah mucikari yang bertanggungjawab terhadap fasilitas yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual antara korban dan pemakai.

V. PENCEGAHAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Peran Pemerintah

Hasil penelitian Mohamad Nuh (2005:86-87) di Kota Bandung, mengungkapkan bahwa respons Pemerintah Kota Bandung terhadap penanganan atau aksi penghapusan perdagangan perempuan dan anak, baru pada tingkat sosialisasi pembentukan infrastruktur kelembagaan yang terkait dengan penanganan *trafficking*. Pemerintah kota Bandung telah menerbitkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak. Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah kota Bandung bekerjasama dengan beberapa LSM, tampaknya belum cukup efektif untuk mengurangi jumlah korban *trafficking*.

Intisari hasil penelitian dengan judul "Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak" yang dilakukan oleh Ahmad Sofian, dkk (2004) di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa fenomena perdagangan anak untuk pelacuran masih dianggap sebagai hal baru, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah Sumatera Utara masih bersifat umum, yaitu dikaitkan dengan kebijakan tentang pelacuran atau program untuk wanita tunasusila. Institusi yang sudah mengambil tindakan konkret pada masalah perdagangan anak terbatas di kalangan LSM dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Di tingkat DPRD, penanganan dilakukan sebatas pemetaan terhadap besar masalah.

Intisari hasil penelitian yang berjudul "Paedofilia di Bali" yang dilaksanakan oleh Rohman dan Andria Rosy Starinne pada tahun 2005, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bali berikut aparat birokrasi dari tingkat provinsi

hingga desa cenderung mengambil sikap diam dan sekedar memantau perkembangan kasus. Sedangkan hasil penelitian yang berjudul "Utang Selilit Pinggang" yang dilaksanakan oleh Johanna Debora Imelda pada tahun 2004 di Jakarta Utara tidak mengungkapkan peran pemerintah dalam penanganan perdagangan anak perempuan melalui sistem ijon di Jakarta Utara.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dipandang masih relatif kecil. Hal itu dapat dimaklumi mengingat acuan yang digunakan selama ini adalah KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia yang tegas secara hukum. Diharapkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.

B. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Sejahtera Indonesia (Bahtera) sejak lama memberi bantuan pendampingan bagi korban dalam bentuk dampingan sosial, medis dan psikologis. Disamping itu Bahtera juga telah melakukan kampanye melawan tindakan perdagangan anak melalui poster maupun media lainnya. LSM lain, misalnya lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dan institut perempuan (IP), di kota Bandung melaksanakan diskusi publik tentang pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban *trafficking* secara bersama-sama. Diskusi publik yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan ruang bagi pembahasan mengenai pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak korban *trafficking* dari berbagai perspektif dan upaya membangun kesadaran mengenai persoalan *trafficking* sebagai persoalan yang

sangat mendesak untuk segera ditangani.

Sofian dkk (2004:16) menyatakan untuk mengetahui bentuk atau model kebijakan penanganan masalah perdagangan anak di Provinsi Sumatera utara, menarik untuk melihat pengalaman LSM *Cambodia Women's crisis center (CWCC)* mengambil empat langkah kebijakan untuk menangani perdagangan anak, yaitu preventif, proteksi, rehabilitatif dan reintegratif.

1. Langkah Preventif (Pencegahan)

Langkah pencegahan ini merupakan suatu upaya untuk mencegah agar anak tidak diperdagangkan atau jatuh ke dunia pelacuran melalui peningkatan tingkat kesadaran tentang hak-hak anak, bahaya eksploitasi seksual ataupun trik yang dipergunakan oleh pelaku perdagangan anak. Kegiatan ini diberikan kepada semua elemen masyarakat dengan cara memperkuat dan memobilisasi komunitas lokal untuk memonitor maupun melindungi anak-anak mereka atau dengan cara merangsang inisiatif berbasis komunitas lokal tentang perlindungan.

2. Langkah Proteksi (Perlindungan)

Cara yang digunakan adalah melalui peningkatan jaringan hukum atau penguatan implementasi hukum tersebut. Langkah perlindungan dapat efektif apabila terdapat bentuk jaminan dan mekanisme hukum yang berlaku untuk perlindungan anak dapat terdesiminasi secara utuh.

3. Langkah Rehabilitatif (Pemulihan)

Strategi yang dipilih untuk mengatasi dampak yang lebih buruk yang diderita oleh si anak sebagai korban adalah pembentukan *crisis center*, layanan dukungan bagi korban/anak yang diselamatkan, pemantauan dan perencanaan layanan, serta pendidikan non formal dan pelatihan keahlian.

4. Langkah Reintegratif (Pengembalian)

Hal yang harus diperhatikan dalam proses reintegrasi adalah penerimaan anak dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah.

C. Peran Masyarakat

Di samping respons pemerintah dan LSM, terdapat pula respons dari masyarakat untuk mencegah semakin meningkatnya perdagangan manusia di Indramayu, terutama di kecamatan Bongas. Rata-rata warga Bongas tergolong miskin dan berpendidikan rendah. Animo warga Bongas untuk mengirim anak perempuan ke luar negeri sangat tinggi begitu melihat anak tetangga berhasil "menyulap" rumah orangtuanya menjadi rumah megah dan mewah, sepulang dari luar negeri. Kondisi membuat sebagian orangtua tidak menghargai pendidikan tinggi, kedudukan atau pangkat. Upaya untuk mengatasi hal itu, pada tahun 2004 Nono dan Syarif membuka SLTP gratis, bekerjasama dengan organisasi internasional untuk migrasi (IOM) dan Yayasan Kusuma Buana di Jakarta. Upaya itu diperkuat dengan penyuluhan terus menerus dan bekerjasama dengan camat setempat, apabila tidak bisa mencegah keinginan orangtua dari anak-anak yang sedang mencari kerja, mereka berusaha mencari pekerjaan dengan prosedur yang sesuai dengan identitas asli. Dengan cara itu angka perdagangan anakpun turun dari 17 orang pada tahun 2005 menjadi 8 orang pada tahun 2007 (Kompas 18/4/2008).

D. Pemberdayaan Sosial Keluarga

Pemberdayaan sosial keluarga merupakan suatu tawaran sebagai solusi pencegahan perdagangan perempuan dan anak. Tujuan pemberdayaan sosial keluarga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat.

Ketahanan sosial keluarga merupakan unsur penting dalam pencegahan dan penanganan berbagai permasalahan sosial. Posisi strategis ini hanya akan dapat diwujudkan apabila keluarga mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara serasi dalam kehidupan keluarga dan sebagai unsur aktif partisipatif dalam upaya pembinaan lingkungan sosial yang tentram dan sejahtera (Pola Operasional Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga, 2003:21).

Pada kenyataannya jumlah keluarga yang mengalami ketidakberdayaan makin besar seiring dengan makin lemahnya kemampuan

dalam menjalankan fungsi dan perannya. Ketidakberdayaan ini akan menjadi pemicu terhadap makin lemahnya ketahanan keluarga dan masyarakat. Lemahnya ketahanan keluarga dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah dalam keluarga, seperti terjadinya disharmoni dalam keluarga, kurang berjalannya sosial kontrol atau pengawasan sosial, terhambatnya fungsi sosialisasi, semakin berkurangnya fungsi perlindungan dan tidak jarang terjadi perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama. Kondisi keluarga yang demikian akan mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, perlu ditingkatkan ketahanan sosial keluarga melalui pemberdayaan.

Pemberdayaan kehidupan keluarga dan lingkungan sosial merupakan salah satu aspek pembinaan keluarga yang mengupayakan keluarga mampu berfungsi secara efektif dan sebagai penangkal utama terhadap pengaruh nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Tujuan pemberdayaan sosial keluarga adalah meningkatkan kemampuan, motivasi dan peran keluarga dalam mencegah dan memecahkan masalah sosial. Adapun tujuan khususnya, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan setiap anggota keluarga dalam melaksanakan peran yang sesuai dengan kedudukannya, sehingga fungsi dan peran keluarga dapat terlaksana secara optimal; (2) meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah keluarga maupun dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi anggotanya; (3) terjadinya interaksi sosial yang akrab dan saling mendukung antar keluarga maupun dengan komunitas lingkungannya; (4) terwujudnya suasana kehidupan keluarga yang harmonis, sehingga proses pembentukan kepribadian dan tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan baik; dan (5) meningkatnya ketahanan sosial keluarga, terutama dalam menangkal dampak negatif dari arus informasi, industrialisasi dan globalisasi, serta mencegah masalah-masalah yang dihadapi keluarga secara mandiri bersama komunitasnya (lihat kebijakan strategi pemberdayaan peran keluarga, 2004:6).

Mencermati tujuan khusus pemberdayaan sosial keluarga diatas, berarti pemberdayaan

merupakan upaya melakukan perubahan atau peningkatan dari yang tidak atau kurang berdaya menjadi berdaya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sulistiati (2004:28) dalam makalahnya yang berjudul "Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Sosial", yaitu : bagi seorang pelaku perubahan apa yang dilakukan terhadap klien baik perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat tidak lepas dari upaya memberdayakan dari keadaan yang tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

Upaya meningkatkan ketahanan sosial keluarga digunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Sukoco (2005:26-27) mengemukakan pekerjaan sosial juga dinyatakan sebagai suatu profesi pertolongan manusia (*the Human service or helping profession*) yang bertujuan untuk mencegah permasalahan sosial orang, sehingga mereka dapat meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosial (*social functioning*). Pengertian *social functioning* mengarah kepada cara yang digunakan orang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memecahkan permasalahan maupun memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pembahasan tentang *social functioning* tidak lepas dari pembahasan *social role* (peranan sosial) dan status sosial orang tersebut di lingkungannya. Status sosial orang mencerminkan adanya hak dan kewajiban yang merupakan cerminan dari norma dan nilai lingkungan/masyarakat yang diberikan sesuai dengan statusnya. Untuk itu, orang dituntut dan diminta oleh lingkungannya melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban itulah yang dijadikan standar atau ukuran untuk menentukan apakah orang dapat berfungsi sosial atau tidak. Jadi seseorang tidak berfungsi sosial adalah orang yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan peranan yang diharap masyarakat berdasarkan status yang mereka miliki. Intervensi Pekerja Sosial terhadap klien semacam itu ialah : (1) Meningkatkan kemampuan dan kemauan klien untuk memahami norma atau nilai lingkungan sosialnya; (2) meningkatkan kemampuan dan kemauan agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya; dan (3) meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk berintegrasi dengan orang lain.

Sesuai dengan tujuan khusus pemberdayaan sosial keluarga sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, hal-hal yang perlu ditingkatkan agar keluarga mempunyai ketahanan sosial, yaitu:

1. Pelaksanaan Peran Sesuai Kedudukan

Di semua masyarakat, orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (*role relations*). Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses dimana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki. Peran utama ayah dan ibu dalam keluarga sudah jelas. Sang ibu mulai dengan pengasuhan anak, menanamkan ikatan badaniah dan rohaniah yang dekat karena kepuasan timbal balik. Tugas-tugas sosial yang berhubungan dengan hal itu bersifat ekspresif, emosional atau penggabungan dari kedua itu. Ia bertugas menghibur, merawat, mendamaikan kembali mereka yang berselisih. Sang ayah adalah tokoh pemimpin, mengatur tenaga kerja untuk produksi, pertentangan politik atau perang. Ia harus memecahkan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan luar, baik sosial atau jasmaniah. Apabila ayah atau ibu dalam suatu keluarga tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perannya, berarti keberfungsian keluarga tersebut lemah yang mengakibatkan lemahnya ketahanan sosial keluarga.

Kondisi keluarga yang demikian perlu ditingkatkan, dan hal itu merupakan tugas Pekerja Sosial untuk mengadakan perubahan melalui pembinaan dan bimbingan untuk menyadarkan keluarga melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2. Pemenuhan Kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar keluarga adalah sandang, pangan, dan papan atau perumahan. Tidak semua keluarga, terutama keluarga yang kurang beruntung

dapat memenuhi kebutuhan dasar yang dimaksud. Oleh karena itu dalam upaya pemberdayaan sosial keluarga dipandang perlu diberi bantuan berupa stimulan usaha ekonomi produktif. Usaha ini perlu dibina dan diawasi oleh Pekerja Sosial bekerjasama dengan unsur lain, seperti tenaga dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan sebagainya. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan kondisi keluarga dapat ditingkatkan.

3. Terjalannya hubungan akrab antar keluarga dan lingkungan

Kedudukan utama setiap keluarga ialah fungsi pengantara pada masyarakat besar. Sebagai penghubung pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Hanya melalui keluargalah masyarakat itu dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. Sebaliknya keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai suatu sistem kelompok sosial yang lebih besar mendukung keluarga sebagai sub sistem yang lebih kecil, atau sebagai syarat agar keluarga itu dapat bertahan maka kedua macam sistem ini haruslah saling berhubungan dalam banyak hal yang penting.

Sehubungan dengan itu diharapkan Pekerja Sosial dengan menggunakan profesi Pekerjaan Sosial dapat membantu keluarga-keluarga agar mereka memahami kondisi dan kenyataan-kenyataan yang dihadapi keluarga dengan cara meningkatkan kemampuan, mengkaitkannya dengan sistem sumber.

4. Terwujudnya Keluarga harmonis

Penelitian psikiatrik menekankan pada kesulitan yang dialami orang-orang yang pada masa kanak-kanaknya hidup dalam keluarga : "selaput kosong", dimana orang-orang melaksanakan kewajiban resminya satu kepada yang lain, tetapi tidak memberikan pengertian, kasih atau dukungan dan tidak menaruh minat untuk saling berkomunikasi. Banyak rumah tangga atau keluarga yang utuh secara semu mempunyai akibat tidak sehat pada anak-anak. Mereka kurang

menghargai satu dengan yang lain, acuh tak acuh, tidak menunjukkan kasih sayang dan hidup rukun. Kondisi keluarga yang demikian dapat pula disebut dengan istilah "disharmoni Keluarga.

Terhadap keluarga yang demikian perlu adanya intervensi dari Pekerja Sosial untuk melakukan perubahan agar keluarga yang "disharmoni" menjadi keluarga yang "harmoni" dengan mencerminkan kasih sayang, hidup rukun satu sama lainnya yang menjadi ciri suatu keluarga yang bahagia.

Dengan meningkatnya ke empat komponen sebagaimana yang telah dibahas diatas, diharapkan keluarga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya, sehingga mempunyai ketahanan sosial yang dapat menjadi benteng untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial. Keluarga yang demikian diharapkan dapat mencegah terjadinya korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak cukup memprihatinkan. Mereka pada umumnya berasal dari Propinsi Kalimantan Barat dan Jawa Barat dan sebagian besar atau 75,77 persen dikirim ke Malaysia, terutama untuk menjadi pekerja seks komersial.
2. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah akibat dari kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Disamping itu, hal penting yang harus diperhatikan adanya keterlibatan orang sebagai pelaku terjadinya *trafficking*.

3. Respons pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak masih terbatas pada tingkat sosialisasi dan penyusunan infrastruktur kelembagaan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia.
4. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak melalui empat langkah kebijakan yaitu : preventif, proteksi, rehabilitatif dan reintegratif.
5. Upaya pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui pemberdayaan sosial keluarga dengan cara meningkatkan ketahanan sosial keluarga yaitu : (a) pelaksanaan peran sesuai dengan kedudukan; (b) pemenuhan kebutuhan dasar; (c) terjalinnya hubungan akrab antara keluarga dengan lingkungannya dan (d) terwujudnya keluarga yang harmonis.

B. Saran

1. Mengingat faktor utama penyebab terjadinya kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan terhadap ajaran agama, dan tidak sedikit orangtua ikut terlibat dalam kasus *trafficking*. Ini menunjukkan lemahnya ketahanan sosial keluarga. Disarankan kepada unit terkait pemberdayaan peran keluarga dapat meningkatkan peran dan fungsi keluarga dengan memperhatikan keseimbangan bantuan yang bersifat ekonomis produktif dengan pelayanan sosial-psikologis.
2. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka disarankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI. 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga. 2004. "Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Peran Keluarga" Suatu makalah disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan peran Keluarga pada Rapat Koordinasi tanggal 10 Juni 2004 di Cawang-Jakarta.
- Firdous. 2004. Respons LSM terhadap perdagangan anak perempuan, Yogyakarta : Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Goode, J William. 2007. Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bumi Aksara.
- Imelda, Johanna Debora, dkk. 2004. Utang Selilit Pinggang-Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan, Yogyakarta : Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Kompas "Kasus-Kasus Perdagangan Manusia 2004-2008", Jumat 18 April 2008
- Kompas " Modus Operandi Perdagangan Manusia Semakin Canggih", 15 Mei 2008
- Mulia, Siti Musdah. 2007. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press.
- Nuh, Mohammad. 2005. Jejaring Anti Traficking, Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Yogyakarta : Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Rohman, Starinne, Adria Rosy. 2005. Paedofilia di Bali – Dewa Penolong atau Pencelaka?, Yogyakarta : Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Rien, Cm Kuntari. 2008. " Hikayat Wiralodra, Geliat Bongas, Kompas 18 April.
- Rien, CM Kuntari, Khairma. 2008. "Saya Dijual", Kompas 18 April
- Sofian, dkk. 2004. Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak, Kasus Sumatera Utara, Yogyakarta: kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Sulistiati. 2004. Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Sosial, dalam Isu-isu Tematik Pembangunan sosial ; Konsepsi dan strategi, Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI.
- Sukoco, Heru Dwi. 2005. Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya, Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial – Departemen Sosial RI.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2007. " Himpunan Peraturan perundang-Undangn Republik Indonesia tentang Perdagangan Orang"

BIODATA PENULIS :

Abu Hanifah, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Ketua TIM Penilai Peneliti Instansi (TP2I) Departemen Sosial RI.